

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2019

Komplek Pasar Wisata Kedensari Tanggulangin Sidoarjo
Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perindustrian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, Juli 2019
Kepala,

Heru Budi Susanto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	53
F. Pengungkapan Penting Lainnya	57
VI. Lampiran dan Daftar	58

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA
KOMPLEK PASAR WISATA KEDENSARI TANGGULANGIN SIDOARJO
JAWA TIMUR
TELEPON (031) 8855149, FAXIMILE (031) 8856150

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, Juli 2019
Kepala,

Heru Budi Susanto
NIP 196410031988031004

Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Semester I Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273.125.048 atau mencapai 92.53 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp295.175.000 .

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2019 adalah sebesar Rp5.081.632.722 atau mencapai 47.02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.806.516.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019. Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.591.268.615 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp81.145.699; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.004.430.228; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp505.692.688.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.591.268.615.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah

sebesar Rp272.940.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.196.463.148 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.923.523.148. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp241.048 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.923.282.100.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp5.439.049.015 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5.923.282.100 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.808.507.674 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp4.324.274.589.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Semester I Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

III. LAPORAN OPERASIONAL

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Tantangan dalam pengembangan IKM alas kaki nasional masih membutuhkan *effort* yang cukup besar. BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia) sebagai salah satu *stakeholder* dalam pengembangan kluster industri alas kaki di Indonesia memegang peranan sentral dalam perkuatan dukungan layanan bagi IKM alas kaki nasional. Perencanaan yang baik dan implementasi program yang tepat sasaran memerlukan dukungan banyak pihak agar mampu memberikan dampak langsung bagi IKM.

Sebuah tantangan sekaligus ancaman. Tergantung perspektif sisi mana kita gunakan sebagai masyarakat industri alas kaki Indonesia. Perspektif ini harus digunakan secara proporsional, karena keduanya (tantangan dan ancaman) akan sangat berguna untuk menyusun strategi kedepan secara sistematis dan terukur.

Perspektif Tantangan, adalah sebuah sudut pandang positif bagaimana melihat masa depan industri alas kaki dari sisi skenario /gambaran /kondisi terbaik yang akan dicapai. Berawal dari titik ini, Industri Alas Kaki harus menyiapkan diri dan potensi internalnya untuk memperoleh manfaat dan nilai tambah sebesar-sebesarnya bagi masyarakat. Diperlukan strategi untuk menangkap peluang di masa depan.

Perspektif Ancaman, sebuah sudut pandang (bukan

negatif) yang melihat masa depan industri alas kaki dari sisi skenario/gambaran/kondisi terburuk yang akan diterima atas konsekuensi perubahan di masa depan.

Volume pasar, sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku merupakan potensi natural yang dimiliki oleh masyarakat industri alas kaki Indonesia. Keunggulan tersebut harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh industri lokal dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Namun yang perlu diwaspadai, dalam jangka panjang potensi natural IKM alas kaki nasional (Volume pasar, sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku) tidak bisa menjadi acuan utama strategi pengembangan industri, akan lebih banyak faktor eksternal (tantangan sekaligus ancaman) yang akan mereduksi nilai manfaat potensi tersebut. Faktor eksternal tersebut seperti perubahan demografi, perilaku dan struktur pasar, perkembangan teknologi dan perubahan pada etika dan aturan bisnis bahkan lingkungan.

Dengan tetap konsisten pada rencana strategi lima tahun yang sudah tersusun (2015 – 2019), BPIPI mencoba sebuah pendekatan 5 (lima) pilar strategi organisasi dalam mengimplementasikan strategi tersebut antara lain :

- Pendidikan dan Pelatihan
- Memberikan bantuan konsultasi teknis dan manajemen
- Mengembangkan pusat desain persepatuan
- Memberikan informasi teknologi dan promosi persepatuan

- Memberikan pelayanan pengujian mutu / sertifikasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga
 - Pendapatan Pendidikan Lainnya.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat

adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp. 273.125.048*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp273.125.048 atau mencapai 92.53 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp295.175.000. Pendapatan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia terdiri dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum; Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi; Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Per 30 Juni 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	205.175.000	78.065.000	
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	90.000.000	194.875.000	
Pendapatan Lain-lain	-	185.048	-
Jumlah	295.175.000	273.125.048	92,53

Realisasi Pendapatan Jasa per 30 Juni 2018 mengalami kenaikan 82,40 % (persen) dibandingkan periode yang sama di TA 2017. Hal ini disebabkan karena peningkatan Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum serta Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 30 Juni 2019 dan 2017*

URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2019	REALISASI SEMESTER I 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-		-
Pendapatan Pendidikan	-		-
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN. Dan luran Badan Usaha	-	800.000	-
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	78.065.000	65.020.000	-
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	194.875.000	82.250.000	-
Pendapatan Lain-lain	185.048	1.665.519	-
Jumlah	273.125.048	149.735.519	82,40

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp5.081.632.722

Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2019 adalah sebesar Rp5.081.632.722,- atau 47,02% dari anggaran belanja sebesar Rp10.806.516.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2019*

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.775.000.000	1.544.944.081	55,67
Belanja Barang	7.357.755.000	3.239.738.641	44,03
Belanja Modal	673.761.000	296.950.000	44,07
Total Belanja Kotor	10.806.516.000	5.081.632.722	47,02
Pengembalian	-		-
Jumlah	10.806.516.000	5.081.632.722	47,02

Dibandingkan dengan Semester I TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,64 % (persen) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya realisasi belanja pegawai karena kenaikan tunjangan

kinerja dan belanja modal kendaraan roda 4.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2019	REALISASI SEMESTER I 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.544.944.081	1.273.270.510	21,34
Belanja Barang	3.239.738.641	3.583.068.028	(9,58)
Belanja Modal	296.950.000	-	-
Jumlah	5.081.632.722	4.856.338.538	4,64

Belanja

Pegawai

Rp1.544.944.081,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.544.944.081 dan Rp1.273.270.510. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Semester I TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 21,34 % (persen) dari Semester I TA 2018. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan CPNS baru di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dan Kenaikan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Perbandingan Belanja Pegawai

Per 30 Juni 2019 dan 2019

URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2019	REALISASI SEMESTER I 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	819.382.446	755.008.576	8,53
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	2.485.000	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	723.448.583	518.262.108	-
Jumlah Belanja Kotor	1.545.316.029	1.273.270.684	21,37
Pengembalian Belanja Pegawai	(371.948)	(174)	-
Jumlah Belanja	1.544.944.081	1.273.270.510	21,34

Belanja

Barang

Rp3.239.738.641

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.239.738.641 dan Rp3.583.068.028. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan 9,58 % (persen) dari realisasi belanja barang Semester I TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan turunnya belanja non operasional, belanja persediaan, dan belanja jasa.

Perbandingan Belanja Barang

Per 30 Juni 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2019	REALISASI SEMESTER I 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	319.099.075	322.417.426	(1,03)
Belanja Barang Non Operasional	588.984.740	805.232.598	(26,86)
Belanja Barang Persediaan	111.701.390	224.999.310	(50,35)
Belanja Jasa	566.915.522	802.219.324	(29,33)
Belanja Pemeliharaan	384.017.730	260.958.585	47,16
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.187.597.885	1.146.554.331	3,58
Belanja Perjalanan Luar Negeri	83.356.299	20.686.454	-
Jumlah Belanja Kotor	3.241.672.641	3.583.068.028	(9,53)
Pengembalian Belanja	1.934.000		
Jumlah Belanja	3.239.738.641	3.583.068.028	(9,58)

Belanja Modal

Rp296.950.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.296.950.000 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada semester I Tahun 2019 berupa kendaraan roda 4.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 30 Juni 2019 dan 2018*

URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2019	REALISASI SEMESTER I 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.950.000	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	296.950.000	0	0
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	296.950.000	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp80.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp80.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

Keterangan	30-Jun-19	31-Dec-18
Saldo UP	80.000.000	-
Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	-
Jumlah	80.000.000	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

Keterangan	30-Jun-19	31-Dec-18
Uang Tunai		
Bank Mandiri No. 1410015140312		
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

Keterangan	30-Jun-19	31-Dec-18
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB

Rp0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNB
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

Uraian	30-Jun-19	31-Dec-18
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar

Tagihan

TP/TGR

Rp0

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

No	Nama	30-Jun-19	31-Dec-18
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Bagian Lancar **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

TPA

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

No	Nama	30-Jun-19	31-Dec-18
1			
2			
3			
Jumlah		-	-

Penyisihan **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang Lancar

Rp 0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

Jenis	30-Jun-18	31-Des-17
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

Jenis	TH 2019	TH 2018
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp775.100*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.145.699 dan Rp503.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	30-Jun-19	31-Des-18
Barang Konsumsi	658.999	354.500
Barang untuk Pemeliharaan	368.200	-
Bahan Baku	118.500	-
Suku Cadang	-	148.500
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1.145.699	503.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

No	Debitur	30-Jun-19	31-Dec-18
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

No	Debitur	30-Jun-18	31-Dec-17
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR

yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang Per 30 Juni 2019*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Tanah
Rp0*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai aset tetap berupa tanah seluas 5.500 m² sebesar Rp.0,00 dikarenakan tanah yang dipakai merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang statusnya adalah pinjam pakai. Mutasi transaksi terhadap Tanah pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2019	0

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Per 30 Juni 2019

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			
2			
3			
4			
Jumlah			

*Peralatan dan
Mesin
Rp29.291.018.118*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp29.291.018.118 dan Rp28.994.068.118. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	28.994.068.118
Mutasi tambah:	
Pembelian	296.950.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2019	29.291.018.118
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	25.321.074.140
Nilai Buku per 30 Juni 2019	3.969.943.978

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian Kendaraan Roda 4 senilai Rp.296.950.000

*Gedung dan
Bangunan
Rp0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai aset tetap

berupa Gedung dan Bangunan seluas 3.500 m² sebesar Rp.0,00 dikarenakan Gedung dan Bangunan yang dipakai Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang statusnya adalah pinjam pakai. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2019	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	-
Nilai Buku per 30 Juni 2019	-

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp6.000.000*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.000.000 dan Rp6.000.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Semester I Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6.000.000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2019	6.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	(2.025.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	3.975.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp30.511.250*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp30.511.250 dan Rp30.511.250. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode Semester I Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	30.511.250
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2019	30.511.250
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	0
Nilai Buku per 30 Juni 2019	30.511.250

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp25.323.099.140*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp25.323099.140 dan Rp24.241.973.277. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 30 Juni 2019*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	29.291.018.118	25.321.074.140	3.969.943.978
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.000.000	2.025.000	3.975.000
4	Aset Tetap Lainnya	30.511.250	0	30.511.250
Akumulasi Penyusutan		29.327.529.368	25.323.099.140	4.004.430.228

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp2.013.899.250*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp2.013.899.250 dan Rp2.013.899.250..

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	2.013.899.250
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2019	2.013.899.250
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2019	(1.508.206.562)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	505.692.688

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud Per 30 Juni 2019

Uraian	Nilai Perolehan
Software Original Ruizhou (RecardVer2008)	419.540.000
Adobe CS6	25.685.000
Microsoft Office	4.950.000
Recad Software Design Pattern	145.596.000
Type 2D Recad Software	75.130.000
Crispin Lastmaker	140.407.000
Crispin Shoemaker Pro	330.773.000
Crispin Engineer Pro (Grading)	274.189.000
Shoe Cost 2D Delcam Crispin	163.185.000
Crispin Pattern Cut	60.359.000
Ruizhoi	61.875.000
Sole Engineer procost 2D Delcam Crispin	185.900.000
Adobe in Design	7.653.250
Adobe Photoshop	7.590.000
Adobe After Effects	7.716.500
Adobe Premiere Pro	7.716.500
Sketch Up Pro 2018	12.144.000
2D Shoe Pattern	75.900.000
Adobe Illustrator	7.590.000
Jumlah	2.013.899.250

Aset Lain-Lain **C.22 Aset Lain-Lain**

Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2019	-
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku per 30 Juni 2019	-

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp1.508.206.562*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp1.508.206.562 dan Rp1.363.959.326. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Akumulasi Amortisasi Software	2.013.899.250	1.508.206.562	505.692.688
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	0	0	0
Jumlah	2.013.899.250	1.508.206.562	505.692.688

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp80.000.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp186.994.026*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	135.677.026	
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	51.317.000	
Total	186.994.026	

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Adapun rincian Pendapatan Diterima di Muka pada Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
Total	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	30-Jun-19	31-Des-18
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp4.324.274.589

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.324.274.589 dan Rp5.439.049.015. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp.272.940.000.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp272.940.000 dan Rp147.270.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Per 30 Juni 2019 dan 2018

URAIAN	30-Jun-19	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian	78.065.000	65.020.000	20
Pendapatan Pendidikan	194.875.000	82.250.000	137
Jumlah	272.940.000	147.270.000	85

Pendapatan Pengujian berasal dari jasa pengujian laboratorium alas kaki, sedangkan Pendapatan Pendidikan berasal dari jasa pelatihan tentang alas kaki.

Beban

Pegawai

Rp1.680.621.107

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.680.621.107 dan Rp1.369.426.631. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 30 Juni 2019 dan 2018*

URAIAN	30-Jun-18	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	589.196.360	532.870.020	11
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.585	10.791	(11)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49.104.110	43.763.530	12
Beban Tunj. Anak PNS	13.221.184	11.538.356	15
Beban Tunj. Struktural PNS	20.160.000	20.160.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	5.150.000	-	0
Beban Tunj. PPh PNS	923.259	684.205	35
Beban Tunj. Beras PNS	36.210.000	34.399.500	5
Beban Uang Makan PNS	88.887.000	90.552.000	(2)
Beban Tunj. Umum PNS	30.095.000	30.520.000	(1)
Beban Uang Lembur	2.485.000	-	0
Beban Pegawai (Tunj Khusus/Kegiatan)	845.179.609	604.928.229	40
Jumlah	1.680.621.107	1.369.426.631	23

*Beban
Persediaan
Rp141.940.301*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp141.940.301 dan Rp226.886.102. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2019 dan 2018

URAIAN	30-Jun-19	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	86.023.868	66.618.252	29
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	0
Beban Persediaan Bahan Baku	55.916.433	160.122.850	-
Beban Persediaan Lainnya	-	145.000	(100)
Jumlah	141.940.301	226.886.102	(37)

Beban Barang dan Jasa
Rp1.526.316.337

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.526.316.337 dan Rp1.929.869.348. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena berkurangnya beban bahan, jasa profesi, dan jasa lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 30 Juni 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-19	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	367.137.525	247.917.426	48,09
Beban pengiriman Surat Dinas Pos pusat	3.278.550	0	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	74.500.000	-
Beban Bahan	370.329.750	585.824.050	(36,78)
Beban Honor Output Kegiatan	0	52.512.000	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	218.654.990	166.896.548	31,01
Beban Langganan Listrik	68.355.200	57.454.750	18,97
Beban Langganan Telepon	7.971.022	8.423.574	(5,37)
Beban Langgan Daya dan Jasa Lainnya	10.103.300	8.330.000	21,29
Beban Sewa	69.044.000	50.050.000	37,95
Beban Jasa Profesi	133.700.000	277.450.000	(51,81)
Beban Jasa Lainnya	277.742.000	400.511.000	(30,65)
Jumlah	1.526.316.337	1.929.869.348	(20,91)

Beban Pemeliharaan
Rp353.192.120

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp353.192.120 dan Rp256.064.285. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya

yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena meningkatnya realisasi pemeliharaan gedung dan bangunan serta beban pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Per 30 Juni 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-19	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.880.673	118.507.000	68,67
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132.224.317	115.254.085	14,72
Beban Pemeliharaan bahan untuk pemeliharaan	9.303.600	7.827.200	18,86
Beban Persediaan suku cadang	11.783.530	14.476.000	(18,60)
Jumlah	353.192.120	256.064.285	37,93

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1.269.020.184*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.269.020.184 dan Rp1.167.240.785. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya beban perjalanan biasa. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 30 Juni 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-19	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	678.458.855	456.115.916	48,75
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.150.000	10.560.000	100,28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	354.191.412	446.784.450	(20,72)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	131.863.618	233.093.965	(43,43)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	83.356.299	20.686.454	0,00
Jumlah	1.269.020.184	1.167.240.785	8,72

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat Per 30 Juni 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-19	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Jumlah	0	0	

*Beban
Bantuan
Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

Per 30 Juni 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-19	30-Jun-18	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			
Jumlah	0	0	

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.225.373.099*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.225.373.099 dan Rp1.142.076.982. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 30 Juni 2019 dan 2018*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30-Jun-19	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.081.050.863	990.794.150	9,11
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	75.000	75.000	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Penyusutan	1.081.125.863	990.869.150	9,11
Beban Amortisasi Software	144.247.236	151.207.832	(4,60)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	
Jumlah Amortisasi	144.247.236	151.207.832	(4,60)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.225.373.099	1.142.076.982	7,29

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 30 Juni 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-19	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar			
Jumlah	0	0	

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp241.048

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2019 dan 2018

URAIAN	30-Jun-19	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	800.000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	241.048	19.399.719	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1.284.000	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan*)	0	0	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	241.048	18.915.719	(98,73)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).

Pos Luar Biasa
Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Per 30 Juni 2019 dan 2018

URAIAN	30-Jun-19	30-Jun-18	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.439.049.015

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.439.049.015 dan Rp6.504.212.941.

Defisit LO
Rp5.923.282.100

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp5.923.282.100 dan Rp5.925.378.414. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih
Revaluasi Aset

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang

Tetap Rp0 muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp4.808.507.674

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.808.507.674 dan Rp4.706.603.019. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(273.125.048)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.081.632.722
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	4.808.507.674

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp273.125.048 sedangkan DKEL sebesar Rp5.081.632.722.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
	Jumlah		

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0,-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp4.324.274.589

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.324.274.589 dan Rp5.285.437.546

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH
TANGGAL NERACA**

-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

-

